

Kendala Implementasi Peraturan Bersama Empat Menteri Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS/M Di Kota Padang

Sepriza Elysa¹, Zikri Alhadi²

^{1,2}Universitas Negeri Padang

Email: seprizae@gmail.com, zikrialhadi@fis.unp.ac.id

Abstrak

Dalam mewujudkan tujuan dari peraturan bersama empat menteri tentang pembinaan dan pengembangan UKS/M untuk dapat meningkatkan mutu serta prestasi peserta didik dengan cara menanamkan perilaku hidup bersih serta mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat, tentunya memiliki kendala dalam proses implementasinya. Tulisan ini mendeskripsikan tentang kendala implementasi peraturan bersama empat menteri tentang pembinaan dan pengembangan UKS/M di Kota Padang. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa masih kurangnya komitmen dari anggota TP UKS/M Kota Padang, serta anggota TP UKS/M Kota Padang yaitu kemenag Kota Padang terkendala dari sumber daya manusia yang kurang memadai dan anggaran dalam pelaksanaan peraturan ini yang tidak ada. Serta beberapa sekolah/madrasah di Kota Padang masih terkendala pada sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk kelancaran pelaksanaan program UKS/M.

Kata kunci: *Implementasi peraturan, Kendala, SKB 4 Menteri.*

Abstract

In realizing the objectives of the joint regulation of the four ministers on fostering and developing UKS / M to be able to improve the quality and achievements of students by instilling clean living behavior and creating a healthy educational environment, of course, they have obstacles in the process of implementation. This paper describes the constraints of implementing regulations with the four ministers on the guidance and development of UKS / M in Padang City. From the results of the study it was found that there is still a lack of commitment from members of the Padang City UKS / M TP, as well as members of the Padang City UKS / M TP, namely the Padang City Ministry is constrained from inadequate human resources and the lack of budget in implementing this regulation. And several schools / madrasas in Padang City are still constrained by inadequate facilities and infrastructure for the smooth running of the UKS / M program.

Keywords: *Implementation of regulations; limitations; SKB 4 ministers.*



Received: July 23, 2020

Revised: August 10, 2020

Available Online: August 11, 2020

Pendahuluan

Implementasi peraturan/kebijakan memiliki fungsi dimana agar tujuan serta sasaran dari peraturan/kebijakan dapat terwujud menjadi hasil akhir yang dilaksanakan pemerintah. Dalam hal ini, perlunya tindakan tertentu maupun sarana tertentu yang digunakan untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan (Suparno, 2017). begitu pula dengan implementasi dari SKB 4 menteri tentang pembinaan dan pengembangan UKS/M, memiliki kegiatan pokok dari UKS/M ini dilaksanakan melalui Trias UKS/M yaitu pendidikan Kesehatan agar peserta didik dapat menerapkan pola hidup sehat yang membudaya dalam kehidupan sehari-hari, Pelayanan Kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat yang dimasukkan disini yaitu pelaksanaan kebersihan lingkungan sekitar, keindahannya, kenyamanannya, ketertiban, keamanan, kerindangan serta kekeluargaannya dapat terlaksana dengan baik di sekolah/madrasah (Barat, 2018). Keterlaksanaan UKS/M ini mengingatkan untuk dapat mewujudkan fungsi dari sistem pendidikan nasional yang diharapkan sebagaimana yang tertuang dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3. Seluruh daerah di Indonesia melaksanakan program ini, dan salah satu yaitu Kota Padang.

UKS/M di Kota Padang Sudah terlaksana di beberapa sekolah mulai dari tingkat TK/ sederajat sampai dengan tingkat SMA/ sederajat. UKS/M ini memiliki strata tertentu dalam pelaksanaan program kegiatan baik dalam pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan sekolah yang menciptakan lingkungan sehat. Strata dalam UKS/M memiliki empat tingkatan yaitu tingkat minimal, standar, optimal dan paripurna yang berbeda pada tiap tingkatan sekolah.

Pada strata menjelaskan syarat sekolah yang menjalankan program UKS/M dengan tingkatan strata yang menjadi ukuran terlaksananya program UKS/M. dengan terlaksananya program UKS/M sesuai programnya diharapkan nantinya dapat berdampak positif seperti meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatnya derajat kesehatan peserta didik, dan terwujudnya UKS/M yang diharapkan. Di Kota Padang sendiri terdapat beberapa sekolah yang melaksanakan program UKS/M dengan tingkatan strata yang beragam dari tahun 2016-2019. Dapat dilihat pada tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Strata Sekolah di Kota Padang yang menjalankan program UKS/M

No.	Tingkat sekolah	2016					2017					2018-2019				
		Jlh sekolah	minimal	standar	optimal	paripurna	Jlh sekolah	minimal	standar	optimal	paripurna	Jlh sekolah	minimal	standar	Optimal	paripurna
1.	TK/RA	322	83	131	70	39	371	0	221	131	19	420	0	252	142	26
2.	SD/MI	425	143	185	66	31	429	0	247	162	19	434	0	246	167	21
3.	SMP/MTs	109	21	46	30	12	114	0	59	45	10	120	0	57	48	15
4.	SMA/MA	90	18	35	30	7	100	0	46	43	10	103	0	44	48	13

Sumber: Dokumen Tim Pembina UKS/M kota Padang

Pada tabel 1. menjelaskan jumlah sekolah yang melaksanakan program UKS/M di Kota Padang dengan strata pelaksanaan program, dimana terjadi beberapa peningkatan untuk sekolah dari strata minimal sampai dengan strata optimal dari tahun 2016-2019 nya dan pada strata paripurna terjadi beberapa penurunan dari jumlah sekolah yang menerapkan UKS/M pada tahun 2016 tahun 2017.

Kesuksesan dan keberhasilan dari pembinaan dan pengembangan UKS/M dapat dilihat dari perilaku yang tercermin pada peserta didik yang menjadi sasaran utamanya dan pada masyarakat sekolah yang menjadi sasaran umumnya dengan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat sehingganya dapat menjadi budaya yang dibiasakan dikeseharian. Hal ini merupakan dampak yang diharapkan dari keterlaksanaannya pembinaan dan pengembangan UKS/M disemua satuan pendidikan mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/ MA di Kota Padang. Program peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi seluruh peserta didik yang ada di Kota Padang perlu dilaksanakan sedini mungkin secara terencana, terpadu, terarah, dan terkoordinasi dari empat Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD di Kota Padang yang menjadi perwakilan empat kementerian yang mengeluarkan kebijakan ini dalam hal ini menjadi tanggung jawab Tim Pembina UKS/M (TP UKS/M) Kota Padang.

Peraturan ini mengamanatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya harus dapat menjalankan sesuai dengan kewenangan masing-masingnya. Di dalam peraturan bersama empat menteri tentang pembinaan dan pengembangan UKS/M dijelaskan tentang tugas dan fungsi masing-masing kementerian yang bertanggung jawab dalam keterlaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M yang terdapat dalam pasal 11 sampai dengan pasal 14 SKB 4 menteri. Dalam peraturan bersama empat menteri ini juga menyatakan bahwa membina, mengembangkan, serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat kepada peserta didik dilaksanakan agar lebih terencana dan bertanggung jawab melalui program pendidikan yaitu dari kegiatan kulikuler, ekstrakulikuler, dan melalui kegiatan-kegiatan lain di luar sekolah yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat (Sutanto, 2018).

Untuk mewujudkan tujuan dari pembinaan dan pengembangan UKS/M terkhusus di Kota Padang ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi peserta didik dengan menciptakan lingkungan yang sehat (SKB 4 Meteri). tentunya tak terlepas dari kendala dalam pengimplementasiannya, baik dari dalam TP UKS/M Kota Padang maupun diluar dari TP UKS/M Kota Padang yang menghambat kemaksimalan dari program kebijakan UKS/M bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Metode Penelitian

Kendala implementasi peraturan bersama empat menteri tentang pembinaan dan pengembangan UKS/M di Kota Padang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Moleong (Moleong, 2006) melihat bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu tahapan penelitian yang datanya deskriptif, dihasilkan dari kata-kata lisan/tulisan dari objek yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan di kantor masing-masing anggota TP UKS/M Kota Padang. Dengan sumber data yang dimanfaatkan yaitu sekunder dan primer. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi dalam mengumpulkan datanya. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi yaitu sifatnya menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data penelitian yang ada dengan membandingkan dokument yang ada dengan hasil wawancara dengan narasumber (Sugiyono, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Kendala dalam Implementasi peraturan bersama empat menteri tentang pembinaan dan pengembangan UKS/M di Kota Padang

Kendala yaitu faktor yang menghambat atau yang menjadi halangan pada proses implementasi baik itu internal(dalam) maupun eksternal(luar) dari suatu organisasi. Berdasarkan hasil temuan penelitian kendala implementasi peraturan bersama empat menteri tentang pembinaan dan pengembangan UKS/M di Kota Padang mengalami beberapa kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut Hansen dan Mowen Kendala internal yaitu hambatan yang berasal dari faktor di dalam perusahaan/organisasi itu sendiri. Kendala eksternal yaitu yang menghambat serta membatasi perusahaan/organisasi yang berasal dari faktor luarnya (Hasen, 2007). Berdasarkan hasil temuan penelitian yang menjadi hambatan dalam implementasi peraturan bersama empat menteri tentang pembinaan dan pengembangan UKS/M di Kota Padang mengalami kendala baik internal maupun eksternal dari TP UKS/M Kota Padang.

Kendala Internal

Di lingkungan internal TP UKS/M Kota Padang memiliki beberapa kendala sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sub bagian kesejahteraan masyarakat setda kota Padang yang mengatakan bahwa Tim Pembina terkadang tidak kompak dalam pelaksanaannya yang disebabkan tidak adanya anggaran dari salah satu anggota TP UKS/M Kota Padang sehinganya untuk kemaksimalan pelaksanaan kebijakan tidak terlaksana sesuai yang diharapkan. Dan kurangnya komitmen dari TP UKS/M Kota sehinganya dalam implementasi peraturan ini jalan satu-satu saja.

Selain itu juga terkendala pada sumberdaya manusianya yang kurang di beberapa anggota TP UKS/M Kota Padang dalam pelaksanaannya, dan juga terkendala sumberdaya finansial berupa anggaran dari Kemenag Kota Padang dimana merupakan salah satu anggota TP UKS/M Kota Padang. Sehinganya perkembangannya dalam pembinaan juga terhambat dan kurang maksimal.

Hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan selaku anggota TP UKS/M Kota Padang dari bagian kesehatan keluarga yang mengelola UKS/M dari dinas kesehatan mengatakan bahwa dalam implementasi peraturan bersama empat menteri ini juga memiliki kendala dari segi sumber daya manusianya dimana pada puskesmas Andalas di Padang Timur itu jumlah sekolahnya cukup banyak mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/ MA itu ada sekitar 120 sekolah/madrasah sedangkan pengelolaan UKS/M di sana tentunya ada satu puskesmas sehinganya dengan jumlah peserta didik yang banyak tidak sebanding dengan tenaga kesehatan yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah.

Kendala eksternal

Kendala eksternal tidak hanya terjadi pada pelaksana kebijakan/ peraturan saja, akan tetapi pada kelompok sasaran kebijakan/peraturan juga terjadi. Kendala tersebut dapat berupa kesadaran dari kelompok sasaran dalam menjalankan program dari peraturan bersama empat menteri tentang pembinaan dan pengembangan UKS/M di Kota Padang. Kendala yang dialami dari eksternal TP UKS/M Kota Padang dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu komitmen dari sekolah/madrasah yang masih kurang untuk menjalankan UKS/M sebagaimana seharusnya, dimana untuk kegiatan UKS/M ini harus terlaksana setiap hari, seperti kebersihan lingkungan

sekolah, kualitas makan dan kebersihan kantin harus lah dijaga setiap harinya tetapi lebih terlaksana ketika lomba sekolah sehat dimulai saja.

Dari sarana dan prasarana yang mendukung untuk terlaksananya UKS/M yang diharapkan di sekolah/ madrasah juga menjadi masalah tersendiri bagi sekolah/madrasah karena tidak semua sekolah yang ada di Kota Padang memiliki sarana serta prasarana tersebut yang disebabkan oleh anggaran di sekolah yang belum mencukupi untuk ketersediannya. Dan masih kurangnya guru pembina UKS/M di sekolah dan madrasah karena tidak semua sekolah yang memiliki tenaga pengajar yang paham tentang UKS/M ini.

Pembahasan

Dalam hal melaksanakan kebijakan tentang pembinaan dan pengembangan UKS/M di Kota Padang masih tergolong belum lancar dalam pelaksanaannya yang masih ada kendala baik yang berasal dari dalam Tim Pembinaan UKS/M di tingkat Kota Padang sendiri maupun di luar dari TP UKS/M Kota Padang sendiri yaitu dari tim pelaksana di sekolah/madrasah di Kota Padang. Kendala internal yang salah satunya kurang kompaknya TP UKS/M Kota Padang dalam menjalankan pembinaan dan pengembangan UKS/M ini perlu adanya Koordinasi langsung dari pihak TP UKS/M UKS/M provinsi agar dapat mengarahkan TP UKS/M Kota Padang untuk bisa melaksanakan tugasnya secara bersamaan. Kendala dalam hal sumberdaya pada bagian anggaran dari salah satu anggota TP UKS/M Kota Padang yaitu kemenag Kota Padang jika dibiarkan saja maka akan berdampak juga pada madrasah di Kota Padang untuk mengembangkan kegiatan maupun program UKS/M ini secara baik dan sesuai dengan pedoman dari pelaksanaan UKS/M dengan sebaik mungkin tidak akan berjalan lancar atau bisa dikatakan tergolong lambat. Selain itu sumberdaya manusia dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M masih perlu untuk ditingkatkan dan di tambah jumlahnya. Hal ini diperlukan karena jumlah tenaga pelaksana kebijakan yang sedikit dalam UKS/M di bagian puskesmas tingkat kecamatan yang ada di Padang akan menyebabkan pemerataan pembinaan dan pengembangan UKS/M akan berjalan lambat yang disebabkan keterbatasan dari sumber daya manusianya. Sebagaimana yang di katakan *George C.Edward III*(Subarsono, 2005) tidak akan berjalan efektif suatu peraturan/kebijakan meski sudah disampaikan dengan baik jika kekurangan sumber daya maka pelaksanaannya akan kurang efektif.

Selain itu kendala eksternal dalam membina dan mengembangkan UKS/M ini terdapat pada tim pelaksana yang kebanyakan terhalang pada pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang UKS/M berjalan sukses. Kendala keuangan menjadi penghambat dalam hal pengadaannya. Serta kesadaran dari tim pelaksana sekaligus kelompok sasaran dari kebijakan ini untuk konsisten dalam melaksanakan UKS/M setiap harinya masih perlu diawasi dan ingatkan lagi. Yang dikarenakan hanya terfokus ketika ada perlombaan sekolah sehat saja diluar itu mulai acuh dengan kebiasaan dalam program UKS/M ini.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dari Suryani anggung Pertiwi (Pertiwi, 2014) tentang analisis implementasi pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Semarang. Permasalahan dari penelitian ini, masih belum sesuai kegiatan pokok UKS di sekolah dengan koordinasinya dilapangan. Hasil penelitiannya mengasikkan bahwa pelaksanaan dari program UKS sudah baik namun masih yang belum berjalan sesuai dengan buku pedomannya dan rencana kerja. Penelitian lainnya yaitu dari virna museliza (2019) tentang implementasi perda tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Pekanbaru. Persamaan penelitian Virza Museliza dengan penelitian penulis ialah sama dalam hal melakukan pembinaan bagi sasaran kebijakannya.

Untuk persamaan penelitian Suryani dengan penulis sama membahasa tentang implementasi UKS itu sendiri beserta dengan kendalanya. Perbedaan suryani lebih kepada analisis pelaksanaannya. Dan untuk virza perbedaannya terdapat pada indikator pada penelitiannya.

Kesimpulan

Kendala merupakan suatu faktor yang menghambat serta menghalangi keterlaksanaan implementasi baik itu berasal dari dalam maupun luar dari organisasi pelaksana. Kendala yang dihadapi oleh TP UKS/M Kota Padang dalam pelaksanaan peraturan bersama empat menteri tentang pembinaan dan pengembangan UKS/M di Kota Padang yaitu intrnalnya masih kurang kompak dan komitmment dalam pelaksanaan pembinaan sehingga jalan satu-satu dalam pembinaan. Selin itu juga terkendala sumberdaya baik manusianya maupun finansial dari anggota TP UKS/M kota padang. Kendala ektenal dari TP UKS/M kota padang yaitu dari tim pelaksana yang masih kurangnya pelaksanaan UKS/M di dalam keseharian sehingga ketercapaian tujuan UKS/M berjalan lambat.

Daftar Pustaka

- Biro Bina Mental dan Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat. (2018). *No Title Pedoman Pembinaan dan Pengembangan UKS/M di Provinsi Sumatera Barat*. Padang: Biro Bina Mental dan Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat.
- Hasen, H. (2007). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pertiwi, S. A. (2014). Analisis Implementasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Semarang. *Disertasi*. Universitas Diponegoro.
- Subarsono, S. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, S. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Sutanto, D. (2018). *Pedoman Pembinaan dan Pengembangan UKS/M*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.